

**PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK, TINGKAT  
PENDIDIKAN, DAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
(UMK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI**

**I Gusti Agung Gede Bayu Banyuning<sup>1</sup>**

**I Nyoman Mahaendra Yasa<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

Email: [gungdegst@gmail.com](mailto:gungdegst@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali menunjukkan terjadinya disparitas antar kabupaten/kota yang berfluktuasi, bahkan cenderung melambat setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten/kota secara simultan dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali dan variabel yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder pada 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu dari tahun 2015 hingga 2019 (5 tahun), sehingga besarnya pengamatan 45. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan dan upah minimum kabupaten/kota secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan tingkat pendidikan dan upah minimum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Upah minimum kabupaten/kota merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Diharapkan pemerintah lebih meratakan pembangunan antar wilayah melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di semua wilayah sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, disamping memperhatikan anggaran pendidikan agar cenderung meningkat sesuai peraturan yang berlaku yaitu minimal 20 persen dari APBD, dan perusahaan harus lebih berkomitmen dalam menerapkan upah agar pekerja dapat lebih maksimal dalam melakukan pekerjaannya.

**Kata kunci:** Pertumbuhan Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi.

**ABSTRACT**

*The economic growth of the Province of Bali shows a fluctuating disparity between regencies/cities, and even tends to slow down every year. The purpose of this study is to analyze the effect of population growth, education level, and district/city minimum wages simultaneously and partially on the economic growth of districts/cities in Bali Province and the dominant variables affecting district/city economic growth in Bali Province. The data used is secondary data in 9 districts/cities in Bali Province in the period from 2015 to 2019 (5 years), so the number of observations is 45. The analytical technique used is multiple linear regression analysis. The results showed that population growth, education level and the district/city minimum wage simultaneously had a significant effect on economic growth. Population growth partially has a negative and significant effect, while the level of education and minimum wages partially has a positive and significant effect on economic growth. The district/city minimum wage is the variable has dominant influence on the economic growth of districts/cities in Bali Province. It is hoped that the government will more evenly distribute development between regions through the construction of new growth centers in all regions in accordance with the potential of each region, in addition*

*to paying attention to the education budget so that it tends to increase according to applicable regulations, namely at least 20 percent of the APBD, and companies must be more committed in implementing wages so that workers can maximize their work.*

**Keywords:** *Population Growth, Education, Minimum Wage, Economic Growth.*

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Menurut Sukirno (2006:33), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan pembangunan suatu daerah. Ukuran umum yang sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDB untuk skala nasional atau persentase perubahan PDRB untuk skala provinsi atau kabupaten/kota. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan berarti telah terjadi pembangunan. Terdapat perbedaan antara pertumbuhan ekonomi (*growth*) dengan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam masyarakat (*output*), sebaliknya pembangunan bukan saja memerlukan peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa tetapi juga harus terjadi perubahan dan menjamin pembagiannya (distribusi) seta kesejahteraan secara lebih merata kepada segenap lapisan masyarakat (Maasyirah, 2011).

Pertumbuhan ekonomi dalam beberapa kasus selalu dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan gambaran keberhasilan implementasi kebijakan makro ekonomi suatu daerah yang pada akhirnya juga akan berdampak positif bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Perkins (2001) bahwa pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai argumen untuk memuliakan Negara dan penguasa. Pertumbuhan ekonomi adalah gambaran perkembangan perekonomian dalam periode masa

tertentu bila dibandingkan dengan masa sebelumnya dan perkembangan tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya (Sukirno, 2006:9). Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Ukuran kualitas dilaksanakan dengan pendekatan tingkat kesejahteraan penduduk secara umum tidak hanya merujuk pada kesejahteraan ekonomi semata dengan pencapaian kepuasan individu secara maksimal, tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan atau lingkungan sosial (Suartha, 2017).

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah keadaan ekonomi dalam suatu negara yang menjalankan suatu proses untuk mencapai peningkatan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi telah memperkuat integrasi dan solidaritas sosial, serta memperluas kemampuan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan perlindungan sosial (Pratowo, 2001). Laju pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2012-2019, seperti yang ditunjukkan Tabel 1.

**Tabel 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2012-2019 (dalam %)**

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	6,11	5,69	6,05	6,19	5,96	5,29	5,59	5,56
Tabanan	6,12	6,45	6,53	6,19	6,14	5,37	5,72	5,60
Badung	7,64	6,82	6,98	6,24	6,81	6,09	6,75	5,83
Gianyar	7,15	6,82	6,8	6,3	6,31	5,48	6,01	5,64

Klungkung	6,11	6,05	5,98	6,11	6,28	5,32	5,50	5,44
Bangli	6,14	5,94	5,83	6,16	6,24	5,33	5,50	5,47
Karangasem	5,43	6,16	6,01	6,00	5,92	5,08	5,48	5,50
Buleleng	6,44	7,15	6,96	6,07	6,02	5,39	5,62	5,55
Denpasar	7,16	6,96	7,00	6,14	6,51	6,06	6,41	5,84
<b>Provinsi Bali</b>	<b>6,66</b>	<b>6,69</b>	<b>6,73</b>	<b>6,03</b>	<b>6,33</b>	<b>5,57</b>	<b>6,35</b>	<b>5,63</b>

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa ada disparitas pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota berfluktuasi setiap tahunnya bahkan cenderung melambat. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu Kabupaten Badung sebesar 5,83 persen dan yang terendah yaitu Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali paling tinggi yaitu pada tahun 2018 sebesar 6,35 persen dan paling rendah terjadi di tahun 2017 sebesar 5,57 persen. Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar pertumbuhannya lebih besar dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2019, sedangkan tujuh kabupaten lainnya pertumbuhannya lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Salah satu pemicu melambatnya pertumbuhan ekonomi ini akibat dari status Gunung Agung yang menjadi awas. Pasca erupsi dan naiknya status Gunung Agung menjadi awas mengakibatkan banyak Negara yang mengeluarkan *travel advisory* agar warga negaranya untuk berhati-hati dan menghindari untuk ke Bali. Naiknya status Gunung Agung menjadi awas menyebabkan Bandara Ngurah Rai berpotensi ditutup karena abu vulkanik mengganggu penerbangan, sehingga kondisi ini berakibat pada perekonomian Bali.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. Menurut Lilya Santika Dewi dan Sutrisna (2014) pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali mudah mengalami fluktuasi karena Provinsi Bali sangat bergantung dengan sektor pariwisata, apabila terjadi penurunan jumlah wisatawan hal ini berpengaruh terhadap kondisi masyarakatnya yang memang sulit lepas dari ketergantungan sektor pariwisata. Sehingga dengan melihat permasalahan tersebut pertumbuhan ekonomi harus terus dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output dalam jangka panjang (Boediono, 1985:78). Hal ini menunjukkan ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output total-nya dan sisi jumlah penduduk. Proses kenaikan output harus dianalisis dengan jalan melihat apa

yang terjadi dengan output total disatu pihak, dan jumlah penduduk dipihak lain. Hal ini akan menjelaskan apa yang terjadi dengan GDP total dan apa yang terjadi pada jumlah penduduk. Oleh karena itu, posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi sendiri selalu terkait dengan jumlah penduduk.

Pertumbuhan penduduk tinggi adalah beban bagi pembangunan (Rochaida, 2016). Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin lama semakin banyak pula seiring dengan perkembangan jumlah penduduk tersebut. Pandangan pesimis seperti ini di dukung oleh teori Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk menurut deret ukur, sementara pertumbuhan bahan makanan menurut deret hitung. Simpulan dari pandangan pesimis ini adalah bukan kesejahteraan yang didapat tapi justru kemelaratan apabila pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan dengan baik.

Permasalahan yang muncul di bidang kependudukan bukan hanya pada jumlah yang besar semata akan tetapi juga berimbas pada turunan dari kuantitas yang besar tersebut antara lain adalah persebaran penduduk, kualitas penduduk, kecukupan dari sisi konsumsi, struktur penduduk, modal dan teknologi yang dimiliki juga masih rendah dan akibatnya produktivitas kerja makin menurun serta masalah krusial yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Kondisi ini biasanya terjadi di Negara berkembang, karena ekonomi negara berkembang cenderung kurang modal,

teknologi masih sederhana, dan tenaga kerja kurang ahli. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk benar-benar dianggap sebagai hambatan pembangunan ekonomi, dimana pertumbuhan penduduk yang cepat memperberat tekanan pada lahan dan menyebabkan pengangguran dan akan mendorong meningkatnya beban ketergantungan. Penyediaan fasilitas pendidikan dan sosial secara memadai juga semakin sulit terpenuhi (Todaro, 2003:67). Penelitian yang dilakukan Astuti, dkk (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti semakin tinggi pertumbuhan penduduk maka pertumbuhan ekonomi akan semakin rendah. Hasil penelitian Sandhika dan Hendarto (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut hasil penelitian Novi Sri Handayani, dkk (2016) menyatakan bahwa jumlah penduduk yang bertambah banyak dapat menjadi beban pembangunan daerah sehingga Pemerintah Provinsi Bali perlu mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB, sehingga perlu diteliti kembali mengenai pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui pemanfaatan SDA sangat rentan dengan kemerosotan kualitas SDM. Pemerintah dan masyarakat merasa telah mampu dan cukup atas hasil dari pemanfaatan SDA, tanpa ditunjang pembangunan dari sisi manusia, pembangunan akan

mudah rapuh serta mampu menimbulkan dampak sosial yang buruk. Selain itu era otonomi daerah dan globalisasi menuntut manusia mampu meningkatkan kualitasnya sebagai objek dan subjek suatu pembangunan ekonomi kota maupun daerah.

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi, dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini misalnya dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai laporan pembangunan manusia yang dipublikasikan oleh Badan PBB untuk Pembangunan Manusia (Gunadi, 2002). Tersedianya SDM yang berkualitas ini merupakan syarat penting berlangsungnya pembangunan ekonomi secara berkesinambungan (Sri, 2010).

Modal manusia (*human capital*) dalam bentuk pendidikan maupun kesehatan mempunyai kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi dan berarti juga berguna untuk mempercepat proses pemerataan pendapatan. Investasi untuk pendidikan dan kesehatan memang dibutuhkan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan regional, dengan pertimbangan itu maka dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi regional (Gunadi, 2002). Hal ini penting karena kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah

yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya (Maasyirah, 2011). Berdasarkan kondisi di atas, dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Bali mengalami peningkatan dan penurunan serta ketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota se-Bali selama tahun 2012–2019.

Teori *Human Capital* mengatakan bahwa populasi yang berpendidikan merupakan penduduk usia produktif. Teori *Human Capital* menekankan bagaimana pendidikan meningkatkan teori produktifitas dan efisiensi pekerja dengan meningkatkan tingkat stok kognitif kemampuan pekerja manusia produktif secara ekonomi, yang merupakan produk dari kemampuan bawaan dari investasi pada manusia. Penyediaan pendidikan formal pandang sebagai investasi modal manusia, yang dianggap sama atau bahkan lebih berharga dari modal fisik. Teori *Human Capital* menyimpulkan bahwa investasi dalam modal manusia akan menyebabkan output ekonomi yang lebih besar. Penelitian yang di lakukan oleh Lilya Santika Dewi dan Sutrisna (2014) menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan modal manusia yang terpenting untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Qoharudin dan Rachmawati (2012) yang menyatakan bahwa pendidikan

pada tingkat perguruan tinggi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara kualifikasi lulusan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia, sehingga tingginya tingkat pendidikan belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Upah minimum merupakan variabel kebijakan atau intervensi dalam mekanisme ekonomi pasar dengan cara menetapkan nilai dasar diatas nilai keseimbangan. Upah Minimum sebagaimana yang dikemukakan didalam teori upah efisiensi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja, sehingga berdampak pada meningkatnya hasil produksi dari suatu perusahaan, kemudian akan diikuti dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi (Vina Ardiana Dewi dan Bendesa, 2020). Teori upah efisiensi ini juga didukung oleh hasil penelitian (Capeding *et al.*, 2013) yang menyatakan bahwa upah minimum dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Upah minimum akan menjaga agar upah bagi pekerja pemula tidak terlalu rendah, karena upah minimum yang terlalu rendah akan membahayakan pekerja (Brown *et al.*, 2014). Selain itu, upah minimum juga dapat mengkoordinasi pembangunan di ekuilibrium upah yang tinggi (Magruder, 2013). Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. *Pertama*, upah minimum merupakan alat

proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. *Kedua*, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja (Gianie, 2009:71). Penelitian Nata Mahesa Putra dan Mahaendra Yasa (2020) menyatakan bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak sesuai dengan Bayu Windayana dan Darsana (2020) yang menyatakan bahwa dengan meningkatnya UMK maka menyebabkan peningkatan biaya produksi perusahaan sehingga perusahaan akan mengurangi tenaga kerjanya, hal ini akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk-produk yang dihasilkan semakin menurun karena berkurangnya tenaga kerja yang digunakan sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dan UMK secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, (2) menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dan UMK secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan (3) mengetahui variabel yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, metode ini digunakan karena data yang terwujud merupakan data dalam bentuk angka. Metode penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dan UMK terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Lokasi penelitian ini berada di Provinsi Bali yang mencakup sembilan kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar. Alasan pemilihan lokasi ini karena berdasarkan Tabel 1 menunjukkan terjadinya disparitas pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang berfluktuasi setiap tahunnya bahkan cenderung melambat. Obyek penelitian dalam penelitian ini yaitu, pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dan UMK terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, upah minimum kabupaten/kota, dan pertumbuhan ekonomi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Menurut sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, seperti orang lain

atau dokumen (Sugiyono 2007:129). Data sekunder dalam penelitian ini adalah pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, UMK, serta tingkat pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Jumlah pengamatan dalam penelitian ini di 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu 2015 hingga 2019 (5 tahun) adalah  $9 \times 5 = 45$  dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* (data panel). Pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan dengan metode observasi non prilaku. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Ghozali (2011:19), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, dan range. Analisis ini merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi tentang data yang dimiliki dan tidak bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Hasil uji analisis regresi linier berganda ditunjukkan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	45	.40	2.73	1.0058	.67794
X2	45	5.42	11.23	8.1191	1.62003
X3	45	1.62	2.70	2.0682	.27236
Y	45	5.06	6.81	5.8656	.41399
Valid N (listwise)	45				

*Sumber:* Data Sekunder, 2021

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 45 pengamatan. Nilai minimum variabel pertumbuhan penduduk yaitu sebesar 0,40 persen dan nilai maksimum sebesar 2,73 persen dengan nilai rata-rata pertumbuhan penduduk di kabupaten/kota Provinsi Bali yaitu 1,00 persen dengan standar deviasi sebesar 0,68. Nilai minimum variabel tingkat pendidikan yaitu sebesar 5,42 tahun dan nilai maksimum sebesar 11,23 tahun dengan nilai rata-rata tingkat pendidikan di kabupaten/kota Provinsi Bali yaitu 8,12 persen dengan standar deviasi sebesar 1,62.

Upah minimum kabupaten/kota memiliki nilai minimum yaitu sebesar 1,62 juta rupiah dan nilai maksimum sebesar 2,70 juta rupiah dengan nilai rata-rata upah minimum kabupaten/kota sebesar 2,07 juta rupiah dengan standar deviasi sebesar 0,27. Nilai minimum variabel pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,06 persen dan nilai maksimum sebesar 6,81 persen dengan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali sebesar 5,86 persen dengan standar deviasi sebesar 0,41.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi

kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil uji analisis regresi linier berganda ditunjukkan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.006	.395		17.745	.000
	X1	-.434	.118	-.688	-3.690	.001
	X2	.024	.049	.096	.499	.021
	X3	.852	.171	.561	4.982	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Sekunder, 2021

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut.

$$\hat{Y}_{it} = 7,006 - 0,434X_1 + 0,024X_2 + 0,852X_3$$

$$\text{Sig} = \quad 0,001 \quad 0,021 \quad 0,000$$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan ekonomi

X<sub>1</sub> = Pertumbuhan penduduk

X<sub>2</sub> = Tingkat pendidikan

X<sub>3</sub> = Upah minimum kabupaten/kota

β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, β<sub>3</sub> = Koefisien regresi variabel

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar -0,434 dengan nilai signifikan 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,024 dengan nilai signifikan 0,021 yang lebih kecil dari 0,05. Upah minimum

kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,852 dengan nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.26922120
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.093
	Negative	-.106
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Sekunder, 2021

Berdasarkan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Asymp sig 2-tailed* uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.760 <sup>a</sup>	.577	.546	.27890	2.233

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Sekunder, 2021

Berdasarkan Tabel 5 nilai Durbin Watson sebesar 2,733, pembandingan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 45 (n=45), dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka di tabel DurbinWatson akan didapat

nilai dU sebesar 1,6662. Karena nilai DW 2,233 lebih besar dari batas atas (dU) 1,6662 dan kurang dari 4-1,6662 (2,3338), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas**

		Coefficients <sup>a</sup>	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.296	3.373
	X2	.279	3.578
	X3	.814	1.228

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Sekunder, 2021

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 6, menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* variabel independen lebih besar dari 0,10 dengan nilai *Tolerance* masing-masing variabel independen bernilai pertumbuhan penduduk sebesar 0,296, tingkat pendidikan sebesar 0,279, dan upah minimum kabupaten/kota sebesar 0,814. Sementara itu nilai VIF juga lebih kecil dari 10 dengan nilai VIF yaitu pertumbuhan penduduk sebesar 3,373, tingkat pendidikan sebesar 3,578, dan upah minimum kabupaten/kota sebesar 1,228. Berdasarkan nilai *Tolerance* dan VIF dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

**Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

		Coefficients <sup>a</sup>		t	Sig.	
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.466	.219		2.129	.039
	X1	-.115	.065	-.471	-1.769	.084

X2	.012	.027	.120	.438	.664
X3	.130	.095	.220	1.368	.179

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber: Data Sekunder, 2021

Hasil output SPSS pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten/kota memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , sehingga menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.760 <sup>a</sup>	.577	.546	.27890

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Sekunder, 2021

Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa koefisien determinasi atau  $R^2 = 0,577$  berarti bahwa 57,7 persen variasi dari pertumbuhan ekonomi mampu dijelaskan oleh variasi pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten/kota, sedangkan 42,3 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

**Tabel 9. Hasil Uji Simultan atau Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.352	3	1.451	18.650	.000 <sup>b</sup>
	Residual	3.189	41	.078		
	Total	7.541	44			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Lampiran 6

Berdasarkan Tabel 9 secara simultan variabel pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dengan F hitung sebesar 18,650 dan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang berarti variabel pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh secara serempak terhadap pertumbuhan ekonomi.

**1) Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali**

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa koefisien variabel pertumbuhan penduduk sebesar -0,434 dengan tingkat signifikan 0,001 lebih kecil dari taraf nyata yang digunakan yaitu 0,05 yang berarti variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti apabila pertumbuhan penduduk meningkat sebesar satu persen, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 0,434 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Teori pertumbuhan penduduk oleh Robert Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk meningkat menurut deret ukur, sementara pertumbuhan bahan makanan meningkat menurut deret hitung. Permasalahan yang muncul dibidang kependudukan berimbas pada persebaran penduduk, kualitas penduduk, kecukupan dari sisi konsumsi, struktur penduduk, modal dan teknologi yang dimiliki juga masih rendah

dan akibatnya produktivitas kerja makin menurun serta masalah krusial yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Pertumbuhan penduduk tinggi adalah beban bagi pembangunan (Rochaida, 2016). Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin lama semakin banyak pula seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. Menurut Arsyad (1997:86), kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit di atas tingkat subsisten. Kualitas penduduk rendah disebabkan oleh banyak hal seperti konsumsi yang tidak cukup, persebaran penduduk tidak merata, pendidikan yang masih rendah, serta rendahnya modal dan teknologi yang berimbas pada rendahnya produktivitas. Tidak seimbangya pertumbuhan penduduk dengan persediaan pangan akan mengurangi kualitas penduduk, hal ini akan berdampak ke pendapatan yang menyebabkan tidak cukupnya tingkat konsumsi. Rendahnya kualitas penduduk ini akan berdampak dengan

pertumbuhan ekonomi, karena permasalahan dalam pertumbuhan penduduk merupakan hambatan dalam pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk adalah sebuah proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Permasalahan dalam hal ini adalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi. Keadaan yang demikian memungkinkan pertumbuhan penduduk akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah jika dalam penanganannya tidak bisa dilakukan dengan efektif.

Kepadatan penduduk yang paling tinggi yaitu di Kota Denpasar sebesar 7.412 jiwa/km<sup>2</sup>, karena Kota Denpasar merupakan pusat kota di Provinsi Bali, sehingga banyak masyarakat yang menuju Kota Denpasar untuk menempuh pendidikan maupun pekerjaan. Kepadatan terendah di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Jembrana dengan kepadatan sebesar 330 jiwa/km<sup>2</sup> yang jauh di bawah dari kepadatan Provinsi Bali. Pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali yaitu berfluktuasi cenderung meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk Provinsi Bali menurut kabupaten/kota paling besar yaitu di Kabupaten Badung dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 2.3 persen jauh di atas rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Bali, hal ini bukan disebabkan dari kelahiran melainkan dari aspek migrasi dikarenakan tidak meratanya pembangunan antar wilayah di Kabupaten.

Hasil penelitian yang dilakukan Astuti, dkk (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti semakin tinggi pertumbuhan penduduk maka pertumbuhan ekonomi akan semakin rendah. Hasil penelitian Sandhika dan Hendarto (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **2) Pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali**

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa koefisien variabel pendidikan sebesar 0,024 dengan tingkat signifikan 0,021 lebih kecil dari taraf nyata yang digunakan yaitu 0,05, yang berarti bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti apabila tingkat pendidikan meningkat sebesar satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,024 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Teori *Human Capital* yang pertama kali diperkenalkan oleh Theodore W. Schultz menyatakan bahwa baik pengetahuan dan ketrampilan adalah bentuk modal yang dapat digunakan sebagai investasi. *Human capital* ini dapat menginvestasikan dirinya sendiri melalui berbagai bentuk investasi SDM, diantaranya pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan merupakan modal manusia yang terpenting untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui pendidikan kemampuan berpikir seseorang akan bertambah dan

pada akhirnya dapat dijadikan bekal dalam memasuki dunia kerja. Dengan demikian pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati di kemudian hari. Pembangunan dibidang pendidikan baik formal maupun non formal mempunyai andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Investasi untuk pendidikan dibutuhkan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan regional, dengan pertimbangan itu maka dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi regional (Gunadi, 2002). Tingkat pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Bali berdasarkan Tabel 4.5 meningkat setiap tahunnya. Tingkat pendidikan terbesar yaitu Kota Denpasar sebesar 11,23 tahun di tahun 2019 yang lebih besar dari tingkat pendidikan Provinsi Bali, hal ini disebabkan karena Denpasar merupakan pusat kota Provinsi Bali yang juga merupakan pusat pendidikan sehingga tidak sedikit masyarakat di kabupaten lainnya ke Denpasar untuk menempuh pendidikan. Pentingnya pendidikan menyebabkan pemerintah mengamanatkan pada UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari APBD, namun persentase anggaran pendidikan cenderung menurun dan dibawah 20 persen. Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten dengan persentase anggaran pendidikan tertinggi setiap tahunnya, sedangkan Kabupaten

Badung dan Kabupaten Gianyar memiliki persentase anggaran pendidikan cenderung menurun dengan rata-rata kurang dari 20 persen dari APBD. Apabila persentase anggaran pendidikan cenderung menurun, hal ini dapat mempengaruhi sumber daya manusia (SDM), dan mengakibatkan rendahnya kualitas SDM. Pemerintah sangat penting untuk memperhatikan kembali agar anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD terealisasikan setiap tahunnya, guna memperbaiki kualitas sumber daya manusianya.

Penelitian yang dilakukan oleh Lilya Santika Dewi dan Sutrisna (2014) menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan modal manusia yang terpenting untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Jana Loka Adi Parwa & Murjana Yasa (2019) yang menyatakan bahwa bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun Hasil penelitian ini menolak penelitian Widayanti, dkk (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang.

### **3) Pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali**

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa koefisien upah minimum kabupaten/kota sebesar 0,852 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari taraf nyata yang digunakan yaitu 0,05, yang berarti bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti apabila upah minimum kabupaten/kota meningkat sebesar satu juta rupiah, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,852 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Teori upah efisiensi yang dikembangkan oleh Cafferty pada tahun 1990 dalam (Handayani & Puspasari, 2020) menyatakan bahwa apabila pekerja dengan mendapatkan upah yang tinggi maka dia dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum hidupnya, sehingga dengan demikian apabila kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi maka pekerja akan berangkat ketempat pekerjaannya dengan tenang, dan bagi pekerja sendiri dia akan memberikan konsentrasi yang penuh dan akan mencurahkan pemikiran dan tenaganya secara maksimal selama dia berada di tempat pekerjaannya. Dampak secara ekonomi yang dimunculkan bagi perusahaan adalah tingginya tingkat produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Upah minimum merupakan intervensi dalam mekanisme ekonomi pasar dengan cara menetapkan nilai dasar diatas nilai keseimbangan.

Teori upah efisiensi ini juga didukung oleh hasil penelitian

(Capeding *et al.*, 2013) yang menyatakan bahwa upah minimum dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Melalui upah minimum para pekerja akan memperoleh upah di atas nilai terendah yang ditetapkan dalam upah minimum, sehingga upah yang diperoleh mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari para pekerja. Upah minimum akan menjaga agar upah bagi pekerja pemula tidak terlalu rendah, karena upah minimum yang terlalu rendah akan membahayakan pekerja (Brown *et al.*, 2014).

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. *Pertama*, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. *Kedua*, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja (Gianie, 2009:71). Upah minimum kabupaten/kota adalah suatu penerimaan bulanan (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya (Atiyatna, dkk, 2016). Melalui pendapatan yang diperoleh yang telah sesuai dengan UMK maka

masyarakat melakukan transaksi ekonomi seperti konsumsi, sehingga hal ini akan memacu pertumbuhan ekonomi.

Upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan upah minimum kabupaten tertinggi setiap tahunnya, tahun 2019 UMK Kabupaten Badung sebesar 2,7 juta rupiah. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Badung merupakan pusat perekonomian pada sektor pariwisata di Provinsi Bali. Sedangkan, Kabupaten Bangli merupakan kabupaten dengan UMK terendah di Provinsi Bali yaitu sebesar 2,3 juta rupiah pada tahun 2019. UMK sangat penting untuk diterapkan untuk melindungi pekerja agar upah yang diperoleh tidak terlalu rendah. Namun, penerapan UMK masih dihadapi oleh beberapa kendala, seperti tidak semua perusahaan bisa menerapkan pemberian upah minimum terutama perusahaan-perusahaan kecil serta kurangnya komitmen perusahaan, sehingga pekerja diberikan upah yang sesuai UMK pada bulan pertama dan kedua mulai bekerja kemudian di bulan selanjutnya diberikan upah yang tidak sesuai dengan UMK yang berlaku (Utami, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ade Tresya Dewi dan Ayuningsasi (2020) yang menyatakan bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian Nata Mahesa Putra dan Mahaendra Yasa (2020) menyatakan bahwa upah

minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak sesuai dengan Bayu Windayana dan Darsana (2020) yang menyatakan bahwa dengan meningkatnya UMK maka menyebabkan peningkatan biaya produksi perusahaan sehingga perusahaan akan mengurangi tenaga kerjanya, hal ini akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk-produk yang dihasilkan semakin menurun karena berkurangnya tenaga kerja yang digunakan sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

#### 4) Variabel Dominan

Berdasarkan hasil analisis data, variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah variabel upah minimum kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan oleh *Standardized Coefficients Beta* variabel UMK yang paling besar yaitu sebesar 0,561.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah, yakni sebagai berikut.

- 1) Pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten/kota secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 2) Pertumbuhan penduduk secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan,

sedangkan tingkat pendidikan dan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

- 3) Upah minimum kabupaten/kota berpengaruh paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

### **SARAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menyarankan beberapa hal, yakni sebagai berikut.

- 1) Pertumbuhan penduduk paling tinggi yaitu Kabupaten Badung. Tingginya pertumbuhan penduduk bukan disebabkan oleh tingkat kelahiran, namun migrasi. Pemerintah harus menerapkan beberapa upaya untuk menekan migrasi seperti meratakan pembangunan antar wilayah melalui membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di semua wilayah sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.
- 2) Pemerintah perlu memperhatikan kembali mengenai anggaran pendidikan yang telah terealisasi dari APBD agar kecenderungan persentase anggaran pendidikan cenderung meningkat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu harus minimal 20 persen dari APBD, hal ini penting agar kualitas sumber daya manusia dapat terus ditingkatkan melalui pendidikan yang baik.
- 3) Perusahaan seharusnya lebih berkomitmen dalam menerapkan upah kepada karyawannya, hal ini sangat penting agar pekerja dapat lebih maksimal

dalam melakukan pekerjaannya. Khususnya perusahaan-perusahaan kecil agar tetap memberikan upah yang sesuai dengan upah minimum yang berlaku.

## REFERENSI

- Abdul Fatah, Nasuddin Othman and Shamsiah Abdullah. 2012. Economic Growth, Political Freedom and Human Development: China, Indonesia and Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*, Vol 3 No 1 pp : 291 – 299.
- Achmad, Sjafii. 2009. Pengaruh Investasi Fisik dan Investasi Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990-2004. *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol 3 No 1 pp: 59-76.
- Ade Tresya Dewi, I Gusti Ayu Agung & Anak Agung Ketut Ayuningsasi. 2020. Pengaruh Penggunaan Non Tunai dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. Vol 9 No 8. pp: 810-842
- Akbar Khodabakhshi. 2011. Relationship between GDP and Human Development Indices in India. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol 2 No 3, pp: 251-253.
- Astuti, Windy Ayu., Hidayat, Muhammad., dan Darwin, Ranty. 2017. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*. Vol.7 No.2 pp: 140-147
- Atiyatna, Dirta P; Nurlina T. Muhyiddin; dan Bambang Bemby Soebyakto. 2016. Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 14 No 1 pp: 8-21
- Bayu Windayana, Ida Bagus Agung dan Ida Bagus Darsana. 2020. Pengaruh Tingkat Pendidikan, UMK, Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol 9 No 1 pp: 57-72
- Brown, A.J.G., Merkl, C. & Snower DJ. 2014. The Minimum Wage From a Two-Sided Perspective. *Economics Letters*, Vol 12 No 3, pp.389-391.
- Buendia, Luis and Enrique Palazuelos. 2014. Economic Growth and Welfare State: A Case Study of Sweden. *Cambridge: International Journal*. Vol 7 No 4, pp: 67-82
- Charisma Kuriata G.S. , Irsad Lubis dan Kasyful Mahalli. 2008. Pembangunan Manusia di Indonesia dan Faktor – Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Vol 4 No 1, pp:17-24.

- Ding, Hong. 2014. Economic Growth and Welfare State: A Debate of Econometrics. American Research Institute. *International Journal* Vol. 2 No 2, pp. 165-196
- Lilya Santika Dewi, Nyoman & I Ketut Sutrisna. 2014. Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, Vol 3 No 3 pp: 106 -114
- Elizabeth A. Stanton. 2007. The Human Development Index: A History. Working Paper Series Number 127 : *Global Development and Environment Institute Tufts University*. Vol 8 No 5 pp: 112-134
- Eric Neumayer. 2001. The Human Development Index and Sustainability — a constructive proposal. *Ecological Economics Journal* Vol 3 No 9 pp:101–114.
- Fajrii, Muhammad dan Arman Delis. 2016 Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatra. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], Agustus 2016. ISSN 2303-0186.
- Faqihudin Muhammad. 2010. *Human Development Index (HDI) Salah Satu Indikator yang Populer untuk Mengukur Kinerja Pembangunan Manusia*. <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/Cermin/article/view/64>. Diunduh tanggal 18 bulan 10 tahun 2013.
- Farhad Noorbakhsh. 1998. The Human Development Index: Some Technical Issues and Alternative Indices. *Journal of International Development* Vol 10 No 6 pp: 589 – 605.
- Gianie. 2009. Pengaruh Upah Minimu Terhadap Penyerapan Tenaga kerja Berpendidikan Rendah di Sektor Industri dan Perdagangan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol 5 No 7 pp:78-95
- Hadiyanto, Tommy. 2012. Dampak Investasi Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. Vol 9 No 3 pp: 98-114
- Puspasari, Dwi Agustin & Herniwati Retno Handayani. 2020. Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol 3 No 1, pp: 65-76
- Hastarini Dwi Atmanti. 2005. Investasi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol 2 No 1 pp: 30-39.
- Irawan, Andi . 2015 *Regional Income Disparities in Indonesia: Measurements, Convergence Process, and Decentralisation*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51: 1, 148-149.
- Jana Loka Adi Parwa, I.G.N & I Gusti Wayan Murjana Yasa. 2019. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, Vol 8 No 5 pp: 945-973

- Kurniawan, Robi & Managi Shunsuke. 2018. Economic Growth and Sustainable Development in Indonesia: An Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 54, No. 3, pp: 339–361
- Lonni, Tahir Kasnawi dan Paulus Uppun. 2011. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mamasa. *E-Jurnal Unhas* Vol 13 No 10 pp: 201-223.
- Magruder, J.R., 2013. Can Minimum Wages Cause a Big Push? Evidence from Indonesia. *Journal of Development Economics*, Vol 10 No 1, pp.48-62.
- Maasyirah, A. 2011. Analisis Mutu Modal Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Unhas*, Vol 10 No 7 pp 76-92.
- Mcgregor, Judy., Tweed, David., and Pech, Richard. 2004. Human Capital in the New Economy: Devil's bargain?, *Journal of Intellectual Capital* Vol 5 No 1 pp: 153-164.
- Muritala, Taiwo. 2011. Investment, Inflation and Economic Growth: Empirical Evidence from Nigeria. *International Journal Department of Economics & Financial Studies Fountain University Osogbo Nigeria*. Vol 2 No 5, Pp. 9-16
- Nata Mahesa Putra, I Putu dan I Nyoman Mahaendra Yasa. 2020. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kepulauan Nusa Tenggara. *E-Jurnal EP Unud*, Vol 9 No 8 pp: 1804 - 1832
- Novi Sri Handayani; I.K.G Bendesa; dan Ni Nyoman Yuliarmi. 2016. Pengaruh Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan PDRB Per Kapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol 5 No 10 pp: 3449-3474
- Pambudi, Eko Wicaksono. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. *E-jurnal Undip*. Vol 6 No 4 pp: 97-121
- Perkins, K.A. 2001. Smoking Cessations in Women: Special Consideration. *CNS Drugs*. Vol 15 No 5, pp: 391-411
- Permadi, Yudistira Andi. 2018. Growth, Inequality, and Poverty: An Analysis of Pro-Poor Growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 11 No. 2. Agustus 2018. ISSN : 2303 - 0186
- Pratowo. 2001. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia se Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*. Vol 9 No 4. pp: 25
- Rimbawan, Nyoman Dayuh. 2012. Pertumbuhan Ekonomi dan Kegiatan Ekonomi Angkatan Kerja di Provinsi Bali. *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Vol 6. No 2

- Rochaida, Eny. 2016. Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur. *Forum Ekonomi*. Vol 18 No 1 pp: 14-24
- Sandhika, Ardyan W & Hendarto, Mulyo. 2012. Analisis Pengaruh Aglomerasi, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk, dan Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal. *Journal Of Economics*. Vol 1 No 1, pp: 1-6.
- Skuras, Dimitris., Meccherib, N., Moreirac, M. B., Roselld, J., and Stathopouloua, S. 2005. Entrepreneurial Human Capital Accumulation And The Growth Of Rural Businesses: A Four-Country Survey In Mountainous And Lagging Areas Of The European Union. *Journal of Rural Studies* Vol 2 No 1 pp: 67–79.
- Suartha, Nyoman. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Laju Pertumbuhan dan Implementasi Kebijakan Penduduk di Provinsi Bali. *PIRAMIDA*. Vol. 12 No. 1 pp : 1 – 7
- Subair. 2015. Relevansi Teori Malthus dalam Diskursus Kependudukan Kontemporer. *Dialektika*, Vol. 9, No. 2, pp: 96-110
- Seran, Sirilius. 2017. Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 10 No. 2 Februari 2017.
- Suartha dan Murjana Yasa. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol 10 No 1 pp: 95-107.
- Taufik, Muhammad. 2014. Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 7 No 2. Agustus 2014.
- Umberger, Wendy J. 2015. *Market-Channel Choices of Indonesian Potato Farmers: A Best–Worst Scaling Experiment*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 51, No. 3, 2015: 461–77
- Vicente & Aniceto. 2016. The Impact of Legal Minimum Wages on Employment, Income, and Poverty Incidence in the Philippines. *Disscution Papper*. Vol 63 No 2. pp: 1-11.
- Vina Ardiana Dewi, Ni Kadek dan I Komang Gde Bendesa. 2020. Analisis Pengaruh Investasi dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Bali. *E Jurnal EP Unud*, Vol 9 No 3, pp: 595-625
- Widayanti, Heni Wahyu. Lorentino Togar Laut & Rian Destiningsih. 2018. Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Jumlah Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 1996-2017. *Directory Journal of Economic*. Vol 1 No 2. pp: 182-194

